

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dengan adanya perkembangan zaman dan era globalisasi mendorong terjadinya kemajuan kegiatan ekonomi tanpa batas (Pratama & Soejoto, 2016). Dalam menghadapi isu global guna menggenjot kemampuan perekonomian, Indonesia yang tergolong sebagai salah satu Negara sedang berkembang, pada awal proses pembangunan lebih condong untuk memilih dan mengarah pada strategi pembangunan ekonomi tidak seimbang. Strategi yang tercipta dalam proses pembangunan tersebut yaitu dengan mendorong keberadaan sektor unggul/potensial. Ini dikarenakan terbatasnya sumberdaya pembangunan dalam lingkup spasial (ruang), sehingga kebijakan pembangunan di Indonesia lebih diarahkan untuk menentukan daerah-daerah tertentu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Sutikno & Maryunani, 2007).

Perekonomian Indonesia memang terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi, bahkan kegiatannya juga berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana satu sama lain terikat dalam suatu sistem pengembangan dan saling bergantung (Takalumang et al., 2018). Terlepas dari isu yang terjadi saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia memberi kecemasan pada perkembangan pola ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Analisis *SDGs Center UNPAD* memberi gambaran bahwa salah satu kondisi yang terkena dampaknya adalah sektor potensial. Dimana sektor manufaktur dan industri akan terkena imbas paling parah, nampaknya dengan kemunculan isu global tersebut peran sektor

pertanian sebagai penopang ketahanan pangan seperti dimasa krisis justru akan terulang kembali, maka sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional, wilayah di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dituntut untuk paham mengenai apa saja potensi maupun permasalahan melalui kebijakan *regionalisasi* (Riyadi, 2005).

Pembangunan Nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah memiliki tujuan untuk memacu pemerataan wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dari itu peran serta semua pihak sangat penting dalam pendayagunaan sumberdaya daerah secara optimal dan terpadu. Ini sesuai dengan asumsi Wicaksono (2019), yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi lokal atau daerah tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan Nasional maupun Provinsi, yaitu suatu proses dimana Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengolah sumberdaya yang ada disuatu wilayah dengan membentuk kerja sama atau pola kemitraan antar *stakeholders*, seperti antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta, maupun dengan pihak lainnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong kemampuan ekonomi daerah dan iklim berinvestasi.

Menurut Husna et al. (2013), pembangunan ekonomi juga bisa dianggap sebagai upaya yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam segala bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih baik dan maju. Jadi pembangunan dimaksudkan sebagai perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu bidang ekonomi, struktur sosial, budaya, infrastruktur, kelembagaan Nasional, maupun bidang lainnya demi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, maka konteks pertumbuhan ekonomi wilayah memang tidak bisa dikesampingkan dan selalu berhubungan

erat dengan adanya pembangunan ekonomi. Karena dengan pertumbuhan ekonomi nantinya dapat memajukan pembangunan ekonomi, begitupun sebaliknya adanya pembangunan ekonomi akan mempermudah jalannya pertumbuhan ekonomi (Wicaksono, 2019). Mengingat pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sangat bergantung pada pembangunan ekonomi itu sendiri, dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi. Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional riil, serta dapat pula diartikan sebagai kenaikan hasil atau output perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang (Sukirno, 2003).

Perencanaan yang baik dalam konteks ekonomi *regional* berperan penting sebagai basis *sharing economy* atau kewilayahan yang dianggap kontur terhadap daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah, maka dari itu setiap wilayah perlu menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan dan keunggulan daerah yang bersangkutan dengan dicirikan oleh adanya pemberdayaan entitas ekonomi lokal (Indahsari, 2019). Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Pembangunan yang baik memang harus memperhatikan keanekaragaman daerah, sehingga dalam hal ini penting untuk mengkaji apa yang menjadi sektor potensial daerah, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik baik itu sosial, budaya bahkan geografis yang berbeda sehingga informasi terkait penentuan sektor potensial perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah guna mengembangkan kemampuan daerah”. Untuk itu dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi, menuntut Pemerintah Daerah untuk berorientasi secara global (Husna et al., 2013).

Alasannya karena kondisi tingkat persaingan yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan turut berdampak pada capaian perekonomian di daerah. Sehingga pendekatan dalam perencanaan daerah haruslah memperhatikan perencanaan sektor ekonomi dan perencanaan wilayah. Perencanaan sektoral memfokuskan perhatiannya pada kegiatan yang terdapat di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang beragam dan memiliki daya saing. Sedangkan perencanaan wilayah melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan disuatu wilayah dengan berfokus pada aspek lokasi, dimana kegiatan itu dilakukan sehingga memilih lokasi tersebut. Melalui perencanaan yang sesuai dengan kondisi riil daerah, dampaknya turut menentukan perkembangan suatu daerah (Tarigan, 2005).

Berbicara mengenai perkembangan maupun kemajuan suatu daerah, maka potensi yang dimiliki daerah dapat menjadi sumber kekuatan dan indikasi terhadap capaian keberhasilan (Takalumang et al., 2018). Hal ini benar adanya karena kondisi utama yang menjadi keharusan bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sedangkan daya saing sektor unggul/potensial bukan saja menjadi pemacu kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting bagi penciptaan lapangan pekerjaan dalam jangka panjang agar mampu menyerap tenaga kerja (Huda & Santoso, 2014). Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah, pengembangan ekonomi menjadi upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan jalan mengelolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui adanya penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan modernisasi kegiatan ekonomi (Pratama & Soejoto, 2016).

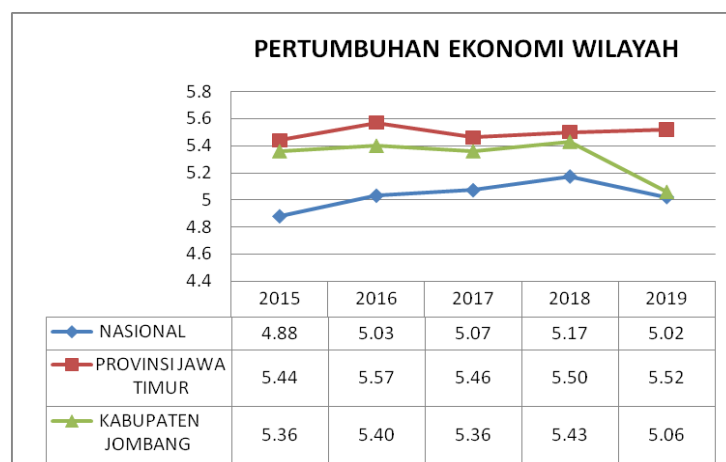
Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur. Menurut BPS Kabupaten Jombang (2019), wilayah ini terbagi menjadi 21 Kecamatan, terdiri dari 302 Desa dan 4 Kelurahan, serta 1.258 Dusun dengan luas wilayah secara keseluruhan yaitu 1.159,50 km². Berkaitan dengan isu global saat ini, Pemerintah Kabupaten Jombang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa desentralisasi sebagai wujud otonomi daerah. Dari adanya wewenang tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendorong kegiatan pembangunan daerah dengan berbasis potensinya, yaitu dengan cara mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya manusia, kelembagaan, maupun sumberdaya fisik secara lokal. Bukti nyatanya beberapa program pembangunan telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, adapun program utamanya tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan potensi unggulan lokal”. Namun adanya program tersebut belum sejalan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan cenderung menyimpang dari konsep wilayah pengembangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Jombang memiliki konsep pengembangan yang dibagi menjadi 5 wilayah, dengan dibatasi menurut batas administrasi wilayah. Tiap-tiap WP tersebut terdiri dari beberapa Kecamatan dan Pedesaan. Adapun 5 WP di Kabupaten Jombang antara lain : WP Jombang, WP Mojoagung, WP Ploso, WP Bandarkedungmulyo, dan WP Mojowarno (Basori et al., 2017). Adanya wilayah pengembangan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui program perencanaan pembangunan

wilayah. Karena menurut informasi yang dikutip melalui RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023, secara ekonomis Kabupaten Jombang memiliki keunggulan potensi wilayah pengembangan untuk menguatkan kondisi perekonomian, sehingga adanya potensi tersebut turut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian beberapa potensi lainnya adalah posisi wilayah yang strategis dan peran setiap sektor ekonomi. Dalam konteks kedaerahan, memang rencana pengembangan lebih diprioritaskan untuk mendorong daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang tahun 2009-2029, penggunaan lahan terbesar lebih diprioritaskan untuk kegiatan sektor potensial, khususnya budidaya pertanian pangan dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang (Bappeda Kabupaten Jombang, 2018).

Struktur ekonomi Kabupaten Jombang memang terkenal sebagai daerah agraris. Dalam bidang pertanian, Kabupaten Jombang termasuk wilayah yang memberikan lumbung pangan setiap tahun tingkat Nasional dan kontribusinya hingga mencapai sebesar 225 ribu ton setara beras (Basori et al., 2017). Sehingga sektor pertanian dianggap kegiatan basis yang sangat diupayakan pengembangannya oleh Pemerintah Daerah, bahkan kontribusinya terhadap capaian pertumbuhan ekonomi juga diupayakan harus lebih besar daripada sektor lainnya. Dalam hal ini potensi ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi wilayah menjadi prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan, maka dari itu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan adalah salah satu petunjuk nyata untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, serta sebagai wujud cerminan daya saing atas keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi

(Athaillah & Masbar, 2013). Mengingat tujuan pembangunan daerah mengacu pada pembangunan Nasional, maka untuk mengetahui apakah capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang sudah baik atau tidak, mengalami peningkatan atau tidak dapat dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut penyajian grafik capaian pertumbuhan ekonominya.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang Dalam Persentase (%)

Sumber : BPS (2019), diolah

Informasi yang telah disajikan pada grafik diatas, menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 cenderung mengalami fluktuatif, dan pertumbuhan ekonominya mengalami titik terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.06%. Kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata dipengaruhi oleh peran dan besar kecilnya sumbangsih sektor ekonomi, khususnya sektor yang dianggap potensial serta menjadi pemimpin bagi sektor-sektor lain. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mengalami fluktuatif, capaiannya masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Jika disejajarkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang sama yaitu rata-ratanya diatas 5 persen, namun nilainya

masih relatif lebih rendah. Disini menunjukkan adanya fenomena bahwa Kabupaten Jombang sebenarnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, apabila dapat mengoptimalkan sektor ekonomi yang dimiliki secara tepat. Karena Kabupaten Jombang memiliki wilayah yang cukup luas dan sektor pertanian yang potensial.

Tingkat daya saing sektoral Kabupaten/Kota di Indonesia yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama *United States Agency of Improvement and Development (USAID)* serta *The Asia Foundation*, mendukung terjadinya fenomena diatas. Hasilnya menyatakan dari 169 Kabupaten/Kota yang disurvei, wilayah di Provinsi Jawa Timur yang berpredikat D ada 6 Kabupaten, meliputi Kabupaten Banyuwangi diperingkat 95, Kabupaten Mojokerto diperingkat 97, Kabupaten Jombang diperingkat 100, Kabupaten Bangkalan diperingkat 107, Kabupaten Magetan diperingkat 118, dan Kabupaten Blitar diperingkat 125 (Suliswanto, 2017). Kabupaten Jombang mendapatkan predikat D karena ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu kemampuan ekonomi daerah. Ternyata di Kabupaten Jombang sampai saat ini masih terdapat kesenjangan informasi tentang potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk menguatkan perekonomian. Padahal acuan utama yang digunakan sebagai pembentuk ukuran daya saing tersebut didasarkan pada beberapa kategori pendukung, salah satunya yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah meliputi laju pertumbuhan ekonomi dan sumbangsih sektoral, khususnya sektor unggul/potensial yang dikembangkan agar menjadi pemimpin bagi sektor-sektor lain. Maka dari itu, untuk mengetahui sumbangsih dan daya saing setiap sektor ekonomi di Kabupaten Jombang bisa dilihat melalui data pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), 2015–2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,326.4	4,400.9	4,430.1	4,511.4	4,528.8
B	Pertambangan dan Penggalian	152.5	156.0	162.4	165.8	169.5
C	Industri Pengolahan	4,735.4	4,984.8	5,285.5	5,594.2	5,741.5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19.5	19.8	20.1	21.2	22.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.1	21.7	22.3	23.3	24.0
F	Konstruksi	2,095.0	2,223.2	2,388.7	2,554.6	2,771.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,444.2	5,825.0	6,249.2	6,655.1	7,109.8
H	Transportasi dan Pergudangan	261.9	276.2	291.8	316.9	345.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	492.6	535.9	582.5	622.4	671.5
J	Informasi dan Komunikasi	1,695.5	1,825.9	1,961.3	2,112.4	2,280.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	559.7	597.6	620.0	644.9	675.8
L	Real Estate	485.4	525.5	557.6	595.9	636.9
M,N	Jasa Perusahaan	69.1	73.5	78.3	84.2	90.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.2	830.6	849.5	874.2	908.9
P	Jasa Pendidikan	1,204.4	1,279.3	1,337.1	1,406.5	1,519.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198.7	215.3	231.9	246.7	265.8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	387.6	408.0	428.7	453.5	482.2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		22,960.2	24,199.1	25,497.0	26,883.2	28,244.6

Sumber : BPS Kabupaten Jombang (2019)

Kabupaten Jombang memiliki kurang lebih 17 sektor. Selama 5 (lima) tahun terakhir sumbangsih sektor pertanian mengalami peningkatan, ini terbukti melalui data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2015-2019 yang tersaji pada tabel 1.1 diatas. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai kemampuan daya saing yang berpotensi besar terhadap peningkatan perekonomian wilayah.

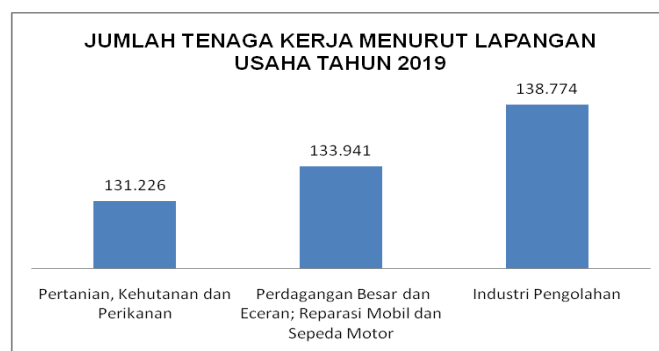
Daya saing sektoral dapat dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perekonomian wilayah dalam mewujudkan pertumbuhan pada tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan lokal, nasional dan internasional (Monica et al., 2017). Konsep daya saing sektoral tersebut dibentuk dari faktor-faktor utama yang merupakan interaksi dari komponen input, output, dan *outcome*. Namun dari data diatas memunculkan adanya keraguan terkait apa sebenarnya sektor unggul/potensial yang dimiliki Kabupaten Jombang. Karena sektor utama yang bisa berpotensi saat ini maupun dimasa mendatang bukan sektor pertanian, melainkan ada yang melatarbelakangi yaitu terdapat sektor lain yang berkembang dan kontribusinya jauh lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan. Disisi lain rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian ternyata semakin lama juga cenderung mengalami fluktuatif dan menurun. Tercatat tahun 2015 sebesar 2.02%, 2016 sebesar 1.72%, 2017 sebesar 0.66%, 2018 sebesar 1.95%, dan 2019 menurun kembali hingga mencapai sebesar 0.38%. Ini membuktikan dengan jelas adanya potensi ekonomi yang tidak sesuai dengan konsep wilayah pengembangan. Karena Kabupaten Jombang notabennya menurut konsep wilayah pengembangan dikenal sebagai daerah agraris dan perannya sangat

besar bagi perekonomian wilayah tidak berjalan sesuai dengan konsep tersebut. Kondisi ini juga menandakan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah dibangun selama ini belum menciptakan usaha yang kondusif dengan cara mempertahankan hasil pertaniannya agar terus meningkat dan tetap menjadi sektor basis/potensial. Karena fakta yang tampak justru sektor pertanian yang seharusnya menjadi sektor raksasa dan pemimpin bagi sektor-sektor lainnya di Kabupaten Jombang malah belum sepenuhnya berkembang sesuai dengan kondisi wilayah setempat.

Kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi wilayah memang tidak bisa dipisahkan dari peran setiap sektor-sektor ekonomi. Besar atau kecilnya sumbangsih setiap sektor ekonomi merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Ali & Bakar, 2018). Seperti halnya Kabupaten Jombang, besarnya sumbangsih yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB daerah, menandakan bahwa pemanfaatan sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Jombang sudah diupayakan pemanfaatannya secara optimal, sehingga turut meningkatkan daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya, semakin sedikit sumbangsih yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB daerah, menandakan bahwa pemanfaatan sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Jombang belum sepenuhnya diupayakan secara optimal. Sehingga Kabupaten Jombang masih sulit untuk menjadi daerah yang berorientasi secara global.

Upaya mendorong daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang perlu dilakukan kedepannya sebisa mungkin harus menunjukkan kearah yang positif, tujuannya agar Kabupaten Jombang dapat berkembang dan menjadi panutan bagi daerah-daerah lain. Ini penting untuk diperhatikan, mengingat

Research GAP dalam penelitian ini karena adanya kesenjangan informasi tentang potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk menguatkan perekonomian wilayah. Kabupaten Jombang memang terkenal sebagai daerah agraris, karena kaya akan hasil pertaniannya yaitu padi. Namun siapa sangka, sektor pertanian tersebut yang digadang-gadang memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian daerah, diharapkan menjadi sektor pemimpin dan capaiannya dalam kegiatan ekspor hasil produksi diupayakan agar terus meningkat, serta dapat berdaya saing dengan sektor lainnya justru semakin lama perannya semakin mengecil dan cenderung tergantikan oleh sektor-sektor lain. Saat ini fenomena yang terjadi menunjukkan struktur ekonomi yang tidak sesuai dengan konsep wilayah pengembangan, utamanya terkait dengan isu global yaitu sektor perdagangan besar dan eceran justru menjadi penyumbang PDRB Kabupaten Jombang terbesar pertama, kemudian industri pengolahan menyumbang PDRB terbesar kedua. Faktor yang mendorong kesenjangan informasi tentang potensi tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh kondisi investasi daerah, diantaranya yaitu banyaknya jumlah potensi pada sektor perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Kemudian juga didukung oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan disektor tersebut. Pernyataan ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)
 Sumber : BPS Kabupaten Jombang (2019)

Grafik diatas menunjukkan jumlah tenaga kerja sektor lain yang berkembang melebihi sektor pertanian. Jumlah pekerja sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2019 mencapai sebesar 133.941 jiwa, sektor industri pengolahan jumlah pekerjanya sebesar 138.774 jiwa. Sedangkan sektor pertanian jumlah pekerjanya jauh lebih rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, yaitu hanya mencapai sebesar 131.226 jiwa. Menurut BPS Kabupaten Jombang (2019), berkembangnya jumlah tenaga kerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor karena didukung oleh infrastruktur yang memadai, yaitu tersedianya 17 pasar umum, 12 pasar hewan dan beberapa pusat perdagangan lainnya yang berperan sebagai penyuplai komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Jawa Timur. Sedangkan berkembangnya jumlah pekerja pada industri pengolahan karena turut didukung oleh majunya kondisi ekonomi global, yaitu kemudahan dalam akses transportasi, serta letak Kabupaten Jombang yang strategis yaitu lokasinya berada pada jalur lintas selatan Pulau Jawa dan dekat dengan kawasan industri besar seperti Surabaya, Mojokerto dan Pasuruan. Demikian sektor tersebut bisa saja menjadi kekuatan daerah, karena kemampuannya turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Fenomena mengenai struktur ekonomi dalam sektor unggul/potensial jika dikaitkan dengan variabel daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah, ketika sektor unggul/potensial kontribusinya rendah, maka kemampuan daerah yaitu daya saing sektoral dan capaian pertumbuhan ekonomi juga cenderung rendah, begitupun sebaliknya. Sehingga dampaknya mempengaruhi apa yang dicita-citakan oleh daerah (Tarigan, 2005). Kondisi inilah yang menjadi permasalahan dan penting untuk dilakukan penelitian. Karena seharusnya yang

diperlukan saat ini adalah alternatif pertimbangan terhadap sektor lain tersebut guna mendorong daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini diambil atau perlu dilihat dari sisi *multiplier* maupun peran setiap sektor dalam memperkuat landasan ekonominya yaitu ekonomi kerakyatan, sebisa mungkin adanya sektor lain tersebut dapat dioptimalkan melalui terciptanya *full employment*, yaitu meningkatnya lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan. Mengingat sebagai sikap pemulihan banyak penduduk di Kabupaten Jombang menaruh harapan besar pada sektor potensial daerah. Oleh karena itu, peneliti penasaran untuk menggali informasi mengenai sektor unggul/potensial yang dimiliki Kabupaten Jombang, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebijakan daya saing sektoral serta pertumbuhan ekonomi wilayah kedepannya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti memiliki ketertarikan dan mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengembangan Sektor Potensial Dalam Mendorong Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja sektor ekonomi yang menjadi sektor unggul/potensial di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana upaya pengembangan sektor unggul/potensial dalam mendorong kemampuan perekonomian yaitu daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor unggul/potensial di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis upaya pengembangan sektor unggul/potensial dalam mendorong kemampuan perekonomian yaitu daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini akan menjadi sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan wawasan pengetahuan atau khazanah keilmuan, khususnya mengenai perkembangan kepustakaan yang berkaitan dengan topik *Ekonomi Regional*, serta sebagai sarana untuk merepresentasikan keilmuan yang selama ini diperoleh pada bangku perkuliahan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pihak-pihak tertentu terkait fenomena yang terjadi. Adapun manfaat penelitian ini ditujukan kepada :

- a. Pemerintah Kabupaten Jombang

Penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam merumuskan rencana dan penyusunan program kerja dibidang ekonomi. Sekaligus sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terkait pengembangan sektor unggul/potensial secara tepat dan optimal. Dengan begitu upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong daya saing sektoral, pertumbuhan ekonomi wilayah,

maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

b. Masyarakat Kabupaten Jombang

Penelitian ini dapat memberikan aspirasi kepada masyarakat selaku subjek atau penggerak dalam mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia agar sektor unggul/potensial daerah bisa terus berkembang dan mempunyai kontribusi besar bagi kemampuan ekonomi daerah.

c. Semua Pihak

Penelitian ini dapat menambah referensi dan memperkaya informasi bagi semua pihak apabila ingin mengadakan penelitian selanjutnya terkait topik dan tema yang serupa, sehingga hasil maupun strategi kebijakan penelitian selanjutnya bisa jauh lebih baik dan lengkap.